



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)
UNIT KERJA : DEPUTI KOMISIONER PENGAWAS PERBANKAN III

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SLAMET EDY PURNOMO**
2. Jabatan : **DEPUTI KOMISIONER - DEPUTI KOMISIONER PENGAWAS PERBANKAN III**
3. NHK : **199393**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 26.820.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 419 m2/400 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 7.100.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 281 m2/170 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 5.620.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 801 m2/480 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/240 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.400.000.000
5. Tanah Seluas 58 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 1.501.000.000**

1. MOBIL, LEXUS MPV Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 640.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
3. MOTOR, PIAGGIO SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000
4. MOBIL, HYUNDAI IONIC 5 SEDAN Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 840.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 220.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. 6.291.258.770**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 1.679.270.013**



F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 36.511.528.783

III. HUTANG

Rp. 1.111.019.310

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 35.400.509.473

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.